

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
BIRO HUKUM SETDAPROVSU**

- Tugas : Membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Penyuluhan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum.
- Fungsi : a. menyiapkan dan mengkoordinasikan, menyusun konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian Urusan Pemerintah dan/atau Kewenangan Otonomi Provinsi di bidang Penyuluhan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan Bantuan Hukum.
b. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangn Kabupaten/Kota dan Pelayanan Bantuan Hukum.

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data		
1	3	4	5	6	7	8		
1	Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah difasilitasi oleh Kemendagri	x 100%	Bagian Peraturan Perundang-Undangn Provinsi	
					Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi			
				Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi	x 100%	Bagian Peraturan Perundang-Undangn Kab/Kota	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dimohon untuk evaluasi dan fasilitasi			
				Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	Jumlah Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang telah dieksaminasi	x 100%	Bagian Peraturan Perundang-Undangn Provinsi	
			Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang diusulkan					
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan.	Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum SetdaprovSU.	Jumlah Pergub dan Perda yang diinformasikan	x 100%	Bagian Peraturan Perundang-Undangn Provinsi		
				Jumlah Pergub dan Perda yang telah ditetapkan				
		Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan PemprovSU dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Penanganan Perkara PemprovSU di Pengadilan.		Jumlah perkara yang ditangani	x 100%	Bagian Bantuan Hukum
					Jumlah perkara yang masuk			
Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM	Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan.		Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan dan Analisa dan Evaluasi Perjanjian Kerja Sama Daerah. yang dilaksanakan	x 100%	Bagian Bantuan Hukum			
		Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang direncanakan						

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,



APRILLA H. SIREGAR, S.H.,M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690421 199003 2 003